



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, serta memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan sistem Informasi Kredit Program (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 521);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 373) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 522);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas mengarahkan Tim Pelaksana dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR;
 - b. Anggota:
 1. melakukan pemantauan pelaksanaan KUR;
 2. menginventarisasi data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui KUR;
 3. mengunggah data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SKIP);
 4. melakukan koordinasi pelaksanaan KUR dengan pihak tertentu;
 5. melakukan evaluasi terhadap capaian dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKIP;
 7. melaporkan pelaksanaan KUR kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Pemerintah Daerah DIY; dan
 8. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Pembantu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 MONITORING DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN KREDIT USAHA
 RAKYAT TAHUN ANGGARAN
 2022.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

1	2	3
		<p>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>15. Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala PT. Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Kas Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala PT. Bank KB Bukopin Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p>

1	2	3
5.	Sekretariat	<p>25. Kepala PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala PT. Bank Nationalnobu Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>27. Kepala PT. Bank Sinarmas Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>28. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Syariah</p> <p>30. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Yogyakarta</p> <p>1. Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Staf Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH